

SATU DASAWARSA MENJELANG KELAHIRAN PDIN

B. Sudarsono
Kepala PDII-LIPI

PENDAHULUAN

Pada tanggal 1 Juni 1996 Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah (PDII-LIPI) genap berusia 31 tahun. Lahir pada tahun 1965 dengan nama Pusat Dokumentasi Ilmiah Nasional (PDIN), sebagai salah satu pusat dalam lingkungan Majelis Ilmu Pengetahuan Indonesia (MIPI). MIPI sendiri dibentuk pada tahun 1956 dan sejak 1967 menjadi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Saat ini PDII-LIPI memandang hari depannya yang penuh dengan ragam tantangan maupun peluang, yang sangat dipengaruhi oleh perkembangan global terutama dengan semakin canggihnya peralatan yang dapat digunakan untuk mengelola informasi. Hal-hal tersebut menuntut perlunya perubahan pola pikir maupun pola tindak organisasi, yang semuanya berawal dari visi baru atas pengelolaan informasi. Visi baru dengan sendirinya tidak dapat dipisahkan dari visi awal sewaktu organisasi itu dibangun.

Pemahaman atas visi awal pembangunan suatu organisasi, khususnya oleh pihak yang tidak terlibat dalam proses pembangunan itu, antara lain dapat dideteksi dengan memahami informasi terekam atas persiapan yang dahulu dilaksanakan. Rekaman informasi tentang suatu organisasi idealnya akan terkumpul lengkap dalam sistem kearsipan organisasi tersebut, selain itu dapat juga diperoleh dari rekaman peristiwa dalam terbitan berkala pada masa yang bersamaan. Salah satu terbitan berkala yang disimak untuk mendapatkan informasi tentang upaya mendirikan PDIN, adalah *Berita MIPI*, yang merupakan salah satu berkala yang diterbitkan MIPI, dan tidak pernah putus terbit selama keberadaan MIPI (1956-1967). Informasi tentang berbagai usaha untuk mendirikan PDII-LIPI telah diinventarisasi, yang terekam dalam *Berita MIPI* selama kurun waktu 10 tahun, dari tahun 1956 sampai dengan tahun 1965. Rekaman peristiwa berikut rasanya ada baiknya disampaikan pada saat PDII-LIPI berulang tahun yang ke-31.

REKAMAN PERISTIWA

1956 Majelis Ilmu Pengetahuan Indonesia (MIPI) dibentuk dengan Undang-undang No. 6 Tahun 1956. Tugas utama majelis adalah :

1. Memajukan dan membimbing dalam arti kata yang seluas-luasnya usaha dan kehidupan pada lapangan ilmu pengetahuan, dengan berpedoman kepada kepentingan nasional pada khususnya dan kepentingan perdamaian dan umat manusia pada umumnya;
2. Memberi pertimbangan-pertimbangan mengenai soal-soal, rencana-rencana dan usaha-usaha yang bertalian dengan ilmu pengetahuan kepada pemerintah baik atas permintaan maupun atas kehendak sendiri.

Selanjutnya untuk melaksanakan tugas di atas MIPI mempunyai 8 pokok kewajiban, salah satunya pada butir d. disebutkan : menyelenggarakan pendaftaran kepustakaan dan benda-benda lain yang berharga untuk ilmu pengetahuan, yang berada di Indonesia.

Pengurus Majelis terdiri atas 9 orang yang untuk pertama kalinya diangkat dengan keputusan Presiden RI No. 118 Tahun 1956, yaitu:

1. Prof. Dr. Sarwono Prawirohardjo, Jakarta Ketua merangkap anggota
2. Prof. Dr. Sardjito, Yogyakarta, Anggota
3. Prof. Ir. Sutedjo, Bandung, Anggota
4. Prof. Ir. Kusnoto Setyodiwirjo, Bogor, Anggota
5. Prof. Ir. H. Johannes, Yogyakarta, Anggota
6. Prof. Ir. Sudiman Kartohadiprodjo, Jakarta, Sekretaris merangkap anggota
7. Prof. Mr. A.G. Pringgodigdo, Surabaya, Anggota
8. Prof. Dr. Purbotjaroko, Jakarta, Anggota
9. Prof. Mr. Drs. Notonagoro, Yogyakarta Anggota

(*Berita MIPI*, 1956, Desember, Nomor pendahuluan)

1957 Untuk pertamakalinya visi atau pandangan tentang dokumentasi disampaikan oleh Ketua MIPI dalam prasarannya pada Konferensi MIPI pertama pada 7 - 9 Januari 1957 di Bandung. Dalam menguraikan tugas dan kewajiban MIPI, disebut 8 kewajiban pokok MIPI. Yang mendasari kerja dokumentasi adalah kewajiban ke-4, yaitu: menyelenggarakan pendaftaran kepustakaan dan benda-benda lain yang berharga untuk ilmu pengetahuan, yang terdapat di Indonesia. Lebih lanjut Ketua MIPI menyebutkan dalam rencana kerja MIPI ditentukan 6 titik berat usaha, titik berat usaha yang ke-6 adalah: meletakkan dasar supaya Majelis menjadi salah satu pusat dokumentasi dan penerangan mengenai soal-soal bertalian dengan ilmu pengetahuan.

(Berita MIPI, Vol. I, 1957. no. 2, p.16-18)

Pada November 1957 untuk pertama-kalinya *Berita MIPI* memuat "Aneka Berita Buku". Di samping memuat daftar buku Perpustakaan MIPI, berisi pula berita-berita penerbitan buku ilmiah dan kegiatan pertukaran dengan pihak lain di dalam maupun di luar negeri.

(Berita MIPI, Vol. I, 1957, no. 4, p. 23-38)

1958 Pada tahun ini "Aneka Berita Buku" dalam *Berita MIPI* muncul dengan berbagai judul seperti: Ruang perpustakaan MIPI (no.1), *Berita Perpustakaan MIPI* (no. 2, 3 dan 4), *Berita Bagian Dokumentasi MIPI* (no. 5), dan *Berita Dokumentasi* (no. 6).

Luwarsih Pringgoadisurjo muncul pertamakalinya sebagai Pj. Kepala Bagian Dokumentasi dan Perpustakaan MIPI. (*Berita MIPI, Vol 2, 1958, no.1*). Nama bagian ini juga bervariasi karena pada nomor 5 dan 6 nama bagian ini hanya disebut "Bagian Dokumentasi" saja.

Pada Bulan Juli 1968 MIPI menerbitkan nomor pertama majalah "Indonesian Abstracts".

(Berita MIPI, Vol 2, 1958, no. 1-6)

1959 Pada tanggal 21 April 1959, Prof Ir. Sudiman Kartohadiprodo, Sekretaris Umum Biro MIPI memimpin rapat pembentukan Panitia Dokumentasi dengan tugas mempersiapkan berdirinya Pusat Dokumentasi Ilmiah Nasional. Susunan panitia ini adalah :

- Ketua : Drs. Moh. Ali, Kepala Arsip Negara
 Sekretaris : L. Pringgoadisurjo, Pj. Kepala Bagian Dokumentasi Biro MIPI
 Anggota : - Khouw Giok Po, Lembaga Pers dan Pendapat Umum
 - RMA Anis, Kementrian PP&K
 - Rusina Pamuntjak, Kepala Perpustakaan Sejarah Politik & Sosial
 - Gusti Endeng, Dokumentasi Markas Besar AURI.
 - Abubakar Hadi, Arsip Negara.

(Berita MIPI, Vol III, 1959, no. 2 p .27)

Pada 1 Juni 1959, Luwarsih Pringgoadisurjo berangkat tugas belajar ke Amerika Serikat. Selama 2 tahun belajar pada "George Peabody College". Winarti Partaningrat, M.Sc menggantikannya sebagai Pj. Kepala Bagian Dokumentasi MIPI.

(Berita MIPI, Vol III, 1959, no. 3, p 84; no.4, p .3)

1960 Di luar lingkungan MIPI, dalam Bulan Mei 1960 dua buah panitia untuk dokumentasi, perpustakaan dan arsip dibentuk dengan SK Menteri Pertama Panitia pertama khusus untuk masalah arsip sedang yang kedua untuk dokumentasi dan perpustakaan. Pembentukan kedua panitia ini atas inisiatif Lembaga Administrasi Negara (LAN), dengan tugas :

- a. mencari keseragaman dalam sistem, metodik dan teknik perpustakaan, dokumentasi, dan kearsipan serta keseragaman istilah-istilah.
- b. merancang surat keputusan Presiden dengan peraturan-peraturan mengenai keseragaman perpustakaan dinas, dokumentasi dan arsip;
- c. memberi laporan berkala tentang segala sesuatu yang telah dihasilkan panitia tsb.

Susunan panitia Dokumentasi dan Perpustakaan adalah :

Ketua	: Mr. F.W. Blogg, Departemen Perhubungan Laut (merangkap anggota)
Wk Ketua	: ODP Sihombing, Departemen Penerangan (merangkap anggota)
Anggota	: Suwati Sumarsidik, MA, Sekolah Perpustakaan Winarti Partaningrat, MSc, MIPI Rusina Pamuntjak, MA, Pengurus PAPADI Cabang Jakarta Raya Kpt. Udara Gusti Endeng, Pengurus Pusat PAPADI Moeljono, Lembaga Administrasi Negara R. Kosim Adisaputra, Ka Bag Pendidikan Dept. Dalam Negeri
Sekretaris	: Hardjono Prawirosoedirdjo.

(Berita MIPI, Vol IV, 1960, no. 5, pp 46-47)

Di lingkungan MIPI, pada tanggal 30 Mei 1960 diadakan Pertemuan Sekretaris Umum MIPI, Prof. Soediman Kartohadiprodjo dengan anggota-anggota Panitia Persiapan Pusat Dokumentasi Ilmiah Nasional untuk membahas *Report on scientific research in Indonesia*, suatu laporan Dr. R.J. Russel dalam rangka konsultasi untuk MIPI. Pertemuan khusus membahas bidang yang berkaitan dengan dokumentasi dan perpustakaan. Hadir dalam pembahasan tersebut anggota panitia : Rusina, Pamuntjak, Gusti Endeng, Khouw Giok Po, Abubakar Hadi, dan Winarti Partaningrat, MSc. Penulis pada pertemuan ini adalah Indijah.

(Berita MIPI, Vol. IV, 1960, no. 4, p.45)

1961 Di luar lingkungan MIPI, panitia dokumentasi dan perpustakaan setelah mengadakan rapat sebanyak 37 kali, pada 31 Mei 1961 menyampaikan hasil karya panitia kepada Direktur LAN. Hasil tersebut adalah : Rancangan Peraturan Presiden tentang Tugas Kewajiban dan Lapangan Pekerjaan Dokumentasi Pustaka dan Perpustakaan di lingkungan Pemerintah, beserta penjelasannya. Rancangan ini disiapkan dengan tujuan agar berlaku bagi seluruh departemen, jawatan, dan badan-badan lainnya. Selanjutnya rancangan ini disahkan menjadi Peraturan Presiden nomor 20 tahun 1961 yang saat ini dikenal dengan Undang-undang PRPS nomor 20 tahun 1961.

(Berita MIPI, Vol V, 1961, no. 5, p.51-52)

Pada 22 Oktober s/d 31 Desember 1961 Winarti Partaningrat, MSc, Pejabat Kepala Bagian Dokumentasi MIPI, berada di Australia dalam rangka persiapan MIPI mendirikan PDIN. Selama tiga bulan beliau mengunjungi perpustakaan khusus dari pusat dokumentasi di lingkungan Commonwealth Scientific and Industrial

Research Organization

(CSIRO), serta beberapa perpustakaan lainnya.

(Berita MIPI, Vol. V, 1961, no. 6, p.37 dan Vol VI, 1962, no. 1, p.40)

1962 Atas permintaan MIPI telah tiba di Indonesia Dr. Walter T. Lorch, seorang ahli dokumentasi dari Unesco, untuk membantu MIPI dalam mendirikan pusat dokumentasi nasional dalam bidang biologi dan pertanian di Bibliotheca Bogoriensis (BB). Waktu itu BB masih berada dalam lingkungan National Research Centre, MIPI. Tugas Dr. Lorch meliputi : pemberian latihan di bidang mikrofilm, reproduksi foto, fotokopi, terjemahan, bibliografi, indeks, abstrak, penerbitan, dsb.

(Berita MIPI, Vol. VI, 1962, no. 3, p 161)

Mulai 19 September 1962, selama 6 bulan Winarti Partaningrat, MSc, Pj. Kepala Bagian Dokumentasi MIPI, berada di Eropa mengikuti kursus dan studi banding dalam rangka persiapan pendirian PDIN.

(Berita MIPI, Vol VI, 1962, no. 4, p 222)

1963 Kesiapan MIPI membentuk PDIN dinyatakan dalam berita MIPI Vol. VII, no. 2, 1963, pada berita kembalinya Winarti Partaningrat dari Eropa. Disebutkan bahwa MIPI sekarang sudah mulai membuat persiapan-persiapan untuk mendirikan PDIN dalam lingkungan National Research Centre. Selain itu MIPI juga telah mengajukan per-

mintaan bantuan Unesco dalam mendirikan PDIN, dan disetujui bantuan Unesco untuk masa 1963-1964.

(Berita MIPI, Vol. VII, 1963, no. 2 p.83-84)

Seorang staf Bagian Dokumentasi MIPI, Kosasih Prawirasumantri, mengikuti Training Course in Scientific Documentation, New Delhi, India, 21 Oktober - 30 November, 1963.

(Berita MIPI, Vol. VIII, 1964, no. 1, p.20-24)

1964 Dua staf Bagian Dokumentasi MIPI, Indijah dan Zultanawar, berangkat ke luar negeri untuk latihan kerja selama satu tahun. Keberangkatan mereka dalam rangka bantuan Unesco kepada MIPI untuk mendirikan PDIN. Indijah berangkat pada Juli 1964, selama 2 bulan memperdalam Bahasa Perancis di Besancon University dan selanjutnya praktek kerja di Centre de Documentation, Paris. Zultanawar berangkat pada Agustus 1964, selama 3 bulan memperdalam Bahasa Jerman di Goethe Institute, Passau dan selanjutnya praktek kerja di Gmelin Institut, Frankfurt.

(Berita MIPI, Vol VIII, 1964, no. 4, p 176)

1965 Pusat Dokumentasi Ilmiah Nasional (PDIN) dibentuk dengan Surat Keputusan Menteri Research Nasional nomor 107/M/Kpts/Str/65 tanggal 1 Juni 1965. Menteri Research Nasional pada waktu itu adalah Dr. Sudjono D. Pusponegoro.

Pada tanggal 31 Juli 1965 Menteri Research Nasional meresmikan PDIN di alamat yang baru yaitu Jl. Raden Saleh 43, Jakarta Pusat serta melantik Winarti Partaningrat, MSc sebagai direktornya yang pertama.

(Berita MIPI, Vol. IX, 1965, no. 3-4, p 107)

PENUTUP

Pengembangan PDIN oleh MIPI bukanlah pekerjaan semalam, dan telah terbukti memerlukan waktu 10 tahun sejak ide pertama dimunculkan. Dari rekaman peristiwa di atas, dapat disimpulkan beberapa

pokok terpenting selama satu dasawarsa penyiapan pendirian PDIN dan yang sekarangpun harus selalu ada dalam visi baru PDII-LIPI.

- ♦ Bahwa perkembangan ilmu pengetahuan memerlukan suatu sistem pendokumentasian yang nantinya sangat berguna dalam memencarkan perkembangan ilmu itu sendiri.
- ♦ Bahwa pendokumentasian itu tidak hanya terbatas pada kepustakaan saja, namun juga atas semua barang yang berguna bagi ilmu pengetahuan itu sendiri.
- ♦ Bahwa dokumentasi dan pemencaran informasi ilmiah merupakan tugas yang harus diemban oleh setiap lembaga ilmiah.

Dari ketiga pokok terpenting di atas, pantaslah dihayati oleh seluruh warga LIPI betapa keberadaan PDIN yang sekarang bernama PDII-LIPI di antara puslitbang-puslitbang dan pusat-pusat lain dalam lingkungan LIPI secara keseluruhan sangatlah mendasar. Di lain pihak, seluruh warga PDII-LIPI perlu menghayati betapa besarnya tanggungjawab ilmiah yang ikut dipikulnya dalam mengembangkan ilmu pengetahuan di Indonesia.

PIDATO YANG MULIA MENTERI RESEARCH NASIONAL PADA PERESMIAN PUSAT DOKUMENTASI ILMIAH NASIONAL

Saudara-saudara yang terhormat,

Saya menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Pimpinan Majelis Ilmu Pengetahuan Indonesia yang sebagai salah satu aparaturnya Departemen Urusan Research Nasional menyelenggarakan pada hari ini satu upacara sederhana untuk meresmikan Pusat Dokumentasi Ilmiah Nasional. Betapa penting dan diperlukannya Pusat Dokumentasi Ilmiah Nasional ini sebagai infrastruktur daripada riset nasional telah diuraikan.

Antara tahun 1962-1965, jadi dalam jangka waktu 3 tahun sejak Departemen Urusan Research Nasional didirikan, telah diresmikan berturut-turut:

1. Lembaga Biologi Nasional di Bogor, yang terdiri dari:
 - a. Kebun Raya di Bogor dengan cabang-cabangnya di Cibodas, Purwodadi (Jawa Timur), Bali, Sumatera Tengah dan Sumatera Utara.

- b. Lembaga Penelitian Botani.
 - c. Herbarium Bogoriense.
 - d. Museum Zoologicum Bogoriense.
 - e. Lembaga Penelitian Laut.
2. Lembaga Ekonomi dan Kemasyarakatan Nasional, Jakarta.
 3. Lembaga Geologi dan Pertambangan Nasional, Bandung.
 4. Lembaga Research Kebudayaan Nasional, Jakarta.
 5. Pusat riset di Cibinong, yang terdiri dari :
 - a. Lembaga Fisika Nasional.
 - b. Lembaga Kimia Nasional
 - c. Lembaga Metalurgi Nasional.
 - d. Lembaga Elektroteknika Nasional
 - e. Lembaga Instrumentasi Nasional.
 6. Pusat Dokumentasi Ilmiah Nasional di Jakarta, termasuk: Perpustakaan di Jakarta dan Perpustakaan di Bogor, yang terakhir dalam kerjasama dengan Departemen Pertanian.
 7. Lembaga Research Kanker Nasional.

Diresmikannya lembaga-lembaga tersebut bahwa jauh sebelum gedung-gedung dan Laboratoria permanen selesai dibangun, maka lembaga-lembaga tersebut dengan ditempatkan dalam gedung-gedung dan laboratoria sementara di Bandung, Bogor dan Jakarta sudah dapat mulai dengan kegiatan-kegiatan riset. Diakui bahwa kegiatan-kegiatan ini—terutama dalam bidang ilmu-ilmu eksakta—untuk sementara masih terbatas berhubungan dengan masih kekurangan ruang-ruang, ahli-ahli riset dan alat-alat ilmiah.

Demikian juga Pusat Dokumentasi Ilmiah Nasional yang masih dapat mulai menyediakan jasanya bagi para karyawan riset dengan sementara ditempatkan dalam gedung ini.

Dengan demikian hendak dikejar Ketetapan II/MPRS/1960 yang mula-mula menugaskan kepada MIPI dan kemudian kepada Departemen Urusan Riset Nasional yang sekali lagi menugaskannya kepada MIPI sebagai aparaturnya untuk membangun lembaga-lembaga tersebut dalam Tahapan pertama daripada Pembangunan Semesta Berencana.

Pembangunan gedung-gedung dan laboratoria permanen daripada lembaga-lembaga tersebut di Bandung, Bogor, Cibinong, dan Jakarta berjalan terus sesuai dengan pasang-surut Anggaran Belanja

Pembangunan yang disediakan. Seluruhnya diharapkan diselesaikan pada tahun 1968 - 1969 dengan beberapa di antaranya seperti Lembaga Geologi dan Pertambangan Nasional di Bandung dan Pusat Riset Nasional di Cibinong sudah pada tahun 1967.

Pendidikan ahli riset yang sudah dan yang akan bekerja pada lembaga masing-masing terus menerus dilakukan juga dengan memberikan beasiswa kepada para mahasiswa pada fakultas/universitas masing-masing, dan pendidikan post-graduate di dalam dan luar negeri.

Perbaikan gedung-gedung dan laboratoria sementara, dan perlengkapan fasilitas-fasilitas seperangkat alat-alat ilmiah dan perpustakaan dilakukan terus menerus. Iklim riset hendak lebih dipupuk dengan sedang dipertimbangkannya untuk lebih memperhatikan nasib para ahli riset.

Memang, pembangunan lembaga-lembaga tersebut dengan laboratorianya sebagai yang pertama di Indonesia merupakan satu tugas yang berat dengan berbagai persoalan teknis yang sangat rumit. Mulai dari itu penghargaan setinggi-tingginya saya sampaikan kepada Pimpinan MIPI. Bagian Pembangunan Departemen Urusan Research Nasional, Direktorat Pusat Research Nasional, Direktorat Lembaga-lembaga masing-masing, Lembaga Afiliasi dan Penyelidikan Industri ITB., dengan dibantu oleh Baperda ahli-ahli dari Departemen PUT., Departemen Keuangan, Bapindo dan ahli-ahli dari Australia, Uni Soviet dan Cekoslovakia yang semuanya bersama-sama menyiapkan mengontrol pembangunan lembaga-lembaga tersebut.

Saudara-saudara yang terhormat,

Dalam menentukan kebijaksanaan riset nasional perlu di perhatian beberapa persoalan pokok

- 1) Kebijakan riset nasional perlu memperhatikan 3 aspek penting dalam pertumbuhan ilmu Pengetahuan, yaitu :
 - a. hubungan antar ilmu pengetahuan, dan teknologi
 - b. hubungan antar ilmu pengetahuan dengan melalui teknologi dan perkembangan ekonomi nasional;
 - c. hubungan antar ilmu pengetahuan/teknologi dan ketahanan nasional.
- 2) Suatu riset nasional harus tumbuh dan disuburkan dalam tanah dan iklim Indonesia sendiri

Apabila tidak, maka akan merupakan suatu "intellectual exercise" belaka, yang sama sekali terlepas dari Revolusi Indonesia.

- 3) Maksud dan tujuan riset nasional harus sesuai dengan Revolusi Indonesia. Tanpa ragu-ragu, maka pengalaman menunjukkan bahwa semua jenis riset, yaitu riset dasar tertuju (oriented basic riset), riset terpakai (applied riset) dan riset perkembangan (development and riset), kesemuanya itu harus diabadikan kepada Tujuan Revolusi Indonesia. Tiap rencana riset dan tiap hasil riset haruslah disusun dan dipetik hasilnya untuk dipergunakan sedemikian rupa, hingga proses produksi secara kualitatif dan kuantitatif dimungkinkan mencapai taraf setinggi-tingginya dengan ongkos serendah-rendahnya,
- 4) Corak dan pelaksanaan riset nasional memerlukan adanya suatu jaringan kesatuan-kesatuan riset yang terdiri dari badan-badan riset, institut-institut riset, laboratoria, pusat-pusat dokumentasi ilmiah termasuk perpustakaan, pusat-pusat alat-alat ilmiah. Keseluruh jaringan itu perlu diperlengkapi secara materiil dan diberi pemeliharaan yang wajar dan yang sesuai keagairahan riset yang menghasilkan lebih banyak invensi dan inovasi.

Diperlukan juga suatu koordinasi yang efektif daripada riset nasional dan penentuan prioritas proyek-proyek riset sesuai dengan pertumbuhan Revolusi.

- 5) Sesuai dengan apa yang telah diamanatkan oleh PJM Presiden bahwa perasan terakhir daripada Pancasila adalah kegotong-royongan, maka riset nasional secara mutlak haruslah pula berbentuk dan berjiwa kegotong-royongan. Kegotong-royongan dibidang riset nasional pasti akan menjamin "short-cuts" menuju ke tujuan tiap usaha riset serta penghematan dana untuk riset-operations dan investment untuk instrumentaria dan chemicalia. Kegotong-royongan tersebut perlu digerakkan pada dua taraf, yaitu, pada taraf memperpadukan semua pengetahuan ilmiah dan pengalaman ilmiah yang dimiliki oleh para ahli riset, serta pula pada taraf penggemblengan pengetahuan ilmiah para ahli dan pengalaman eksperimental yang dimiliki oleh rakyat, khususnya buruh dan tani.

Kegotong-royongan para taraf kedua tersebut itu adalah maha penting sehingga benar-benar riset nasional adalah hasil daripada semua pengetahuan ilmiah dan pengalaman eksperimental daripada seluruh masyarakat kita. Sosialisme Indonesia menghendaki bahwa usaha di bidang riset sekali-kali janganlah terbatas pada kaum ahlinya saja tetap haruslah merupakan suatu yang diciptakan oleh semua unsur kreatif dalam masyarakat sebagai keseluruhan secara bersama.

- 6) Kalau kegotongroyongan di bidang riset dapat digambarkan secara prosedural sebagai tertera di atas maka pada hakekatnya kegotongroyongan merupakan suatu sikap hidup. Dalam hubungan ini maka perlu kita tinggalkan norma-norma dahulu di mana seorang ahli riset merahasiakan seluk beluk riset semata-mata untuk menjaga jangan sampai ada ahli lain yang mendahulunya. Kegotongroyongan di bidang riset dalam sosialisme Indonesia adalah norma dan direktiva sekaligus atas dasar mana tiap ahli riset menganggap hasil riset sebagai kebanggaan seluruh karyawan riset nasional serta atas landasan mana tiap hasil karya seorang ahli riset lain adalah pula kegembiraannya. Sikap ini perlu dipupuk secara sistematis dengan contoh dan teladan dari tenaga-tenaga riset senior kepada yang muda-muda sehingga dalam tiap dan antar berbagai laboratoria dan lembaga riset terciptalah suasana saling menghargai, saling membantu dan saling menjunjung.
- 7) Riset nasional bukanlah suatu konsepsi yang statis yang terikat pada satu tempat dan satu periode sejarah saja. Tidak, riset nasional bersifat dinamis dan tiap "investment" pada masa kini akan menentukan efektivitas riset nasional pada masa datang. Kegotongroyongan di bidang riset, baik bagi segi proseduralnya maupun segi sikap hidupnya, harus inherent dalam jiwa dinamis daripada generasi kita sekarang dan generasi yang akan menyusul. Untuk keperluan tersebut maka perlu dipupuk pada semua tingkatan pendidikan, didalam dan diluar lingkungan sekolah, "research-mindedness" bangsa Indonesia yang tertuju kepengabdian kepada Masyarakat dan Bangsa kita.
- 8) Penelitian nasional di Indonesia mempunyai

corak yang membedakannya dengan penelitian nasional di negara lain. Corak penelitian nasional itu ditentukan oleh ideologi kita, yakni Pancasila-Manipol/Usdek dan terutama oleh tiga kerangka Revolusi Indonesia, oleh taraf perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di negara kita dan oleh kaidah-kaidah sosio-ekonomis-budaya yang sekarang ini sedang mengalami perubahan progresif sesuai dengan irama dan jalannya Revolusi Indonesia.

Apabila meninjau infrastruktur daripada riset nasional di Indonesia yang terdiri dari jaringan badan-badan riset institut-institut riset, laboratoria, pusat-pusat alat-alat ilmiah, dan pusat dokumentasi ilmiah termasuk perpustakaan, maka terdapat pada dewasa ini :

- 149 lembaga ilmiah dari Departemen masing-masing:
- 23 Universitas negeri dengan 140 fakultas
 - 8 institut negeri dengan 37 fakultas/departemen (meskipun universitas/institut/fakultas merupakan juga lembaga-lembaga ilmiah, namun beberapa fakultas membentuk lembaga-lembaga ilmiah khusus untuk riset)
 - 61 perguruan tinggi kedinasan
 - 25 perguruan tinggi swasta yang ijazahnya mendapat penghargaan sama dengan ijazah perguruan tinggi negeri yang setaraf
 - 16 perguruan tinggi yang terdaftar
 - 10 lembaga ilmiah swasta
 - 1 pusat dokumentasi ilmiah nasional
 - 1 pusat alat-alat ilmiah
 - 36 perkumpulan ilmiah

Jumlah majalah ilmiah yang diterbitkan dengan teratur adalah 120 jenis. Tiap lembaga dan universitas/fakultas mempunyai perpustakaan yang sederhana sampai cukup baik.

Di dalam rangka koordinasi, stimulasi dan menyelenggarakan riset nasional, maka Departemen Urusan Research Nasional tidak hanya memperhatikan lembaga-lembaganya sendiri, akan tetapi begitu pula lembaga-lembaga ilmiah daripada Departemen-departemen lain, universitas, fakultas-fakultas dan lembaga-lembaga ilmiah swasta. Tiap tahun disedia-

kan oleh Departemen Urusan Research Nasional sejumlah keuangan dalam rupiah dan devisa untuk melengkapi lembaga-lembaga itu dengan alat-alat, buku-buku dan majalah ilmiah, dan lain-lain yang dapat menggairahkan riset.

Dalam menyelenggarakan riset nasional, maka telah diperoleh persesuaian paham mengenai jenis riset yang diselenggarakan pada lembaga-lembaga Durenas, lembaga-lembaga Departemen-departemen lain dan universitas-universitas/fakultas-fakultas.

Prioritas daripada proyek-proyek riset telah ditetapkan oleh Dewan-dewan Research Nasional yang penyelenggaraannya ditugaskan kepada lembaga-lembaga riset masing-masing dengan disediakan keuangannya.

Hasil daripada riset nasional, yang bilamana mungkin aplikasinya segera dilakukan, diumumkan dalam majalah ilmiah masing-masing didalam dan begitu pula diluar negeri, tergantung dari sifatnya yaitu *classified* atau *non-classified*.

Inventarisasi hasil-hasil riset diadakan dengan diselenggarakannya Kongres Ilmu Pengetahuan Nasional tiap 4 tahun, dengan Seminar-seminar dan Rapat-rapat Kerja ilmiah.

Inventarisasi besar-besaran daripada hasil-hasil riset di Indonesia antara tahun 1945-1965 akan dicakup dalam:

1. Pameran hasil-hasil riset yang akan diresmikan oleh PjM Presiden/Pemimpin Besar Revolusi nanti pada tanggal 15 Agustus 1965. Pameran ini bertema "Berdiri diatas kaki sendiri dilaksanakan dengan dinamika ilmu pengetahuan, teknologi dan riset".
2. Empat buku mengenai riset di Indonesia antara tahun 1945 - 1965 dalam bidang-bidang Kesehatan, Pertanian, Teknologi/Industri dan Ekonomi/Sosial/Budaya yang akan selesai diterbitkan pada tanggal 14 Agustus 1965.

Berita MIPI Vol. 9 No. 3-4 Juli-Oktober, 1965 p.77.

Akhirnya bersama ini saya resmikan Pusat Dokumentasi Ilmiah Nasional dengan menugaskan kepadanya untuk memberikan jasa-jasanya kepada para karyawan riset di Indonesia.

* *Pidato ini telah disesuaikan ejaannya, kecuali nama lembaga dan jabatan yang masih dipertahankan keasliannya.*